



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya lebih dari 100% yaitu 103,9% dari target. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kabupaten Sampang target kategori A dengan nilai Minimal 80,01 dan sasaran terkait Pelayanan Publik yang belum juga berhasil mencapai target kinerja. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Rincian capaian kinerja disajikan pada Lampiran-3.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran			Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Tahun 2018
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Targ et	Realisa si	
1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai EKPPD	Nilai	2,8342	3,1	3,31	106,7 %
	2 Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Barjas e. Bidang Pembangunan f. Bidang Organisasi g. Bidang Humas h. Bidang	%	100	100	100	100%

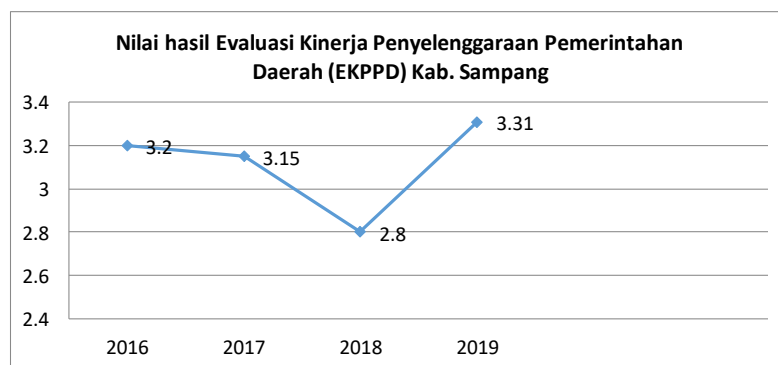


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

	Umum					
	3 Nilai SAKIP		64,23/B	80,01/A	64,99/	81,23

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,3114 atau dengan kategori prestasi tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018

Sedangkan perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh Kabupaten Sampang selama periode sebelumnya adalah sebagaimana tersaji dalam grafik III.2.



Gambar III.1 Nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sampang Tahun 2016-2019

Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bidang Kesra, bidang Hukum, bidang Barjas, bidang Pembangunan bidang Organisasi, bidang Humas dan bidang Umum sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 100%



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Sedangkan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mendapatkan nilai 64,99 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2018 dan 2019

Komponen yang dinilai		2018		2019	
		Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
A	Perencanaan kinerja	30	19,00	30	23,14
B	Pengukuran kinerja	25	13,69	25	16,79
C	Pelaporan kinerja	15	9,15	15	9,98
D	Evaluasi internal	10	3,13	10	5,83
E	Capaian kinerja	20	10,85	20	9,24
Nilai hasil evaluasi		100	64,23	100	64,99
Tingkat akuntabilitas kinerja			B		B

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 :

1. Secara umum terdapat peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sampang meskipun belum signifikan, Pemerintah Kabupaten telah menyusun RPJMD dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik, akan tetapi perlu dibuktikan lagi *sustainability* atas dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Tema Pembangunan yang tertera dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi dasar pembangunan kinerja tahun berkenaan. Hal ini tersebut terlihat pada proses penganggaran dan program prioritas.



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

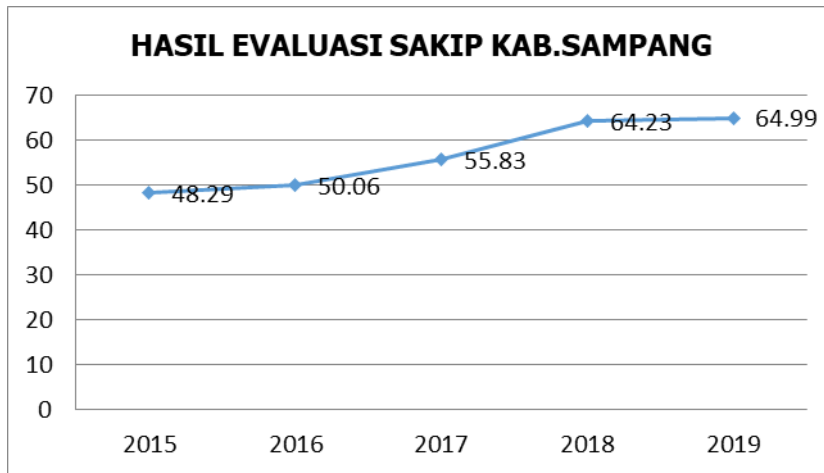
3. Penyusunan peta proses bisnis organisasi, cascading kinerja dan cross-cutting pencapaian kinerja pada RPJMD belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pola hubungan kinerja antar level belum terlihat dengan baik.
4. Perencanaan Kinerja dan peta proses bisnis organisasi pada satuan kerja belum dijabarkan dengan baik pada dokumen penganggaran.
5. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran, sehingga belum bisa dikelompokkan antara program prioritas dan non prioritas. Selain itu, terdapat kecenderungan belum adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.

Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2020 :

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah daerah dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan benar-benar sebagai pedoman pelaksanaan kerja
3. Agar setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan RPJMD mulai dari eselon II sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
4. Dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja yang diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai bank data dan dasar perencanaan kinerja
5. Meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah pengampu akuntabilitas kinerja (Bapelitbangda, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda) sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah.



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Gambar III.2 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sampang Tahun 2015-2019

Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran			Realisasi	Tahun 2019		Capaian Tahun 2019
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Target	Realisasi	
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78,69	81,5	81,3	99,7%

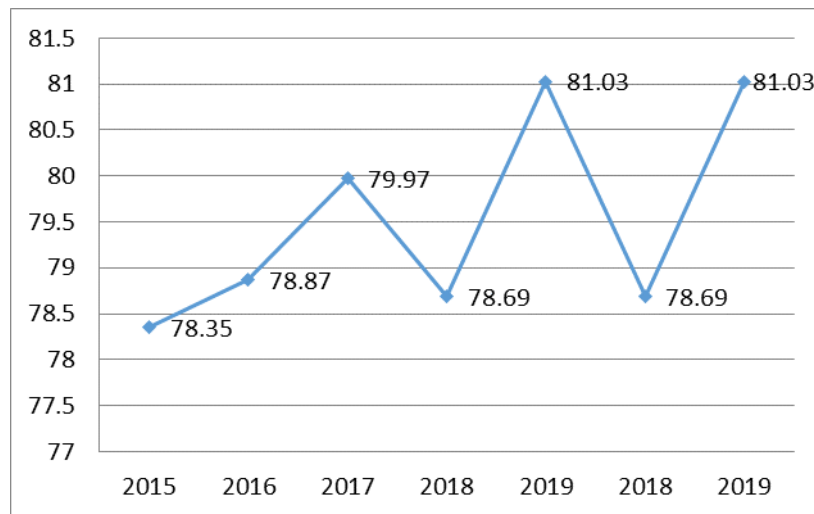
Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 81,3. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total Jumlah Nilai IKM SKPD Kabupaten Sampang dibagi dengan Jumlah SKPD Kabupaten Sampang

$$\text{Didapat : } \frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM SKPD Kab Sampang}}{\text{Jumlah Total SKPD Kab Sampang yang di IKM}} = \frac{3.739,90}{46} = 81,30$$



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Sedangkan perkembangan nilai hasil survey kepuasan masyarakat Kabupaten Sampang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagaimana tersaji dalam gambar III.1



Gambar III.1 Perkembangan hasil survey kepuasan masyarakat Kabupaten Sampang tahun 2015-2019

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik
2. Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan
4. Program Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika
5. Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Kendala :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sampang tidak mencapai target pada RPJMD dan lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena semakin kritisnya masyarakat yang disertai dengan semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan



publik yang diberikan oleh OPD Kabupaten Sampang sedangkan OPD belum melakukan perbaikan pelayanan publik

Upaya Mengatasi :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran (3) Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

Sasaran			Realisasi	Tahun 2019		Capaian
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Target	Realisasi	Tahun 2019
1 Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	1 Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	%	N/A	100	130	130%

Persentase Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2019 mencapai target dengan realisasi 130% dari 10 kebijakan dengan realisasi mencapai



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

13 rumusan kebijakan menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif antara lain melalui program :

1. Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah
2. Penataan Sosialisasi di Bidang Cukai
3. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2019, total anggaran belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp.35.188.551.784,- Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.11.055.954.084,- dan belanja langsung sebesar Rp.24.132.597.700,- Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2019 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :



Tabel III.14 Realisasi APBD Sekretariat Daerah Kab. Sampang Tahun 2019

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	11.055.954.084,-	10.538.523.360,-	95,3
Belanja Langsung	24.132.597.700,-	22.418.342.891,-	92,9
Total APBD	35.188.551.784,-	32.956.866.251,-	93,6

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.15 Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	23,595,898,600	21,960,573,314	93.07
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	118,791,000	63,008,400	53.04
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	417,908,100	394,761,177	94.46
Total Belanja Langsung		24,132,597,700.00	22,418,342,891.00	80.19



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “ Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 130%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”, dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 82,2%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan. Tabel III.16 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Rata-rata capaian kinerja	Serapan (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<100 (Target Tidak Tercapai)	85,1%	Belum efektif
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<100 (Target Tidak Tercapai)	53,04%	Belum efektif
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	>100 (Target Tercapai)	90%	10%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2019 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.



Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

